

Nama : Mohamad Ghinau Thofadilah
NPM : 2213031098\
Mata Kuliah : Ekonomi Industri
Kelas : 2022C

CASE STUDY

Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun meskipun pendapatan per kapita belum mencapai level negara maju. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan *Making Indonesia 4.0* sebagai upaya revitalisasi industri nasional, dengan fokus pada lima sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

Namun, setelah lima tahun implementasi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum signifikan. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru menunjukkan peningkatan pesat dalam sektor manufakturnya.

Pertanyaan:

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.
2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?
3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawaban

1. Jika melihat kasus ini, kegagalan kebijakan *Making Indonesia 4.0* sebenarnya bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Pertama, program ini terlihat bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya di lapangan belum berjalan efektif. Banyak pihak belum benar-benar paham apa yang harus dilakukan, dan koordinasi antara pemerintah, industri, serta dunia pendidikan masih lemah. Padahal, menurut teori kebijakan industri, kerja sama dan koordinasi itu penting supaya arah kebijakan bisa berjalan sesuai tujuan. Kedua, dukungan

pemerintah terhadap sektor industri sering kali masih umum dan tidak fokus. Insentifnya belum diarahkan untuk mendorong perusahaan agar naik kelas atau berinovasi. Akibatnya, sektor industri tetap jalan di tempat dan belum mampu bersaing dengan negara lain. Ketiga, kualitas sumber daya manusia dan kesiapan teknologi kita juga masih jadi tantangan besar. Banyak perusahaan belum siap menerapkan sistem otomatisasi atau digitalisasi. Ditambah lagi, biaya logistik dan energi yang masih tinggi membuat investor lebih tertarik ke negara lain seperti Vietnam. Jadi, bisa dibilang bahwa kegagalan *Making Indonesia 4.0* bukan karena idenya salah, tapi karena pelaksanaannya belum matang dan tidak disertai dukungan nyata di lapangan.

2. Jika dibandingkan dengan Vietnam atau Korea Selatan, kebijakan industri Indonesia memang masih tertinggal dalam hal fokus dan konsistensi. Vietnam misalnya, sangat agresif membuka investasi asing dan membangun kawasan industri yang tertata. Pemerintahnya menyiapkan lahan, infrastruktur, dan pelatihan tenaga kerja supaya investor tinggal masuk dan langsung bisa produksi. Mereka juga fokus pada industri yang sesuai kemampuan, seperti elektronik dan tekstil, lalu perlahan naik ke industri bernilai tambah tinggi. Korea Selatan punya pendekatan berbeda, tapi sama-sama kuat. Dari awal, pemerintahnya sudah tahu sektor apa yang mau dikembangkan, lalu memberikan dukungan penuh berupa dana riset, pendidikan vokasi, dan kebijakan ekspor yang jelas. Mereka juga konsisten — artinya, arah kebijakan tidak berubah-ubah walau ganti pemerintahan. Nah, di Indonesia, justru sering kali kebijakannya berhenti di dokumen strategi. Koordinasi antar lembaga kurang, insentif tidak tepat sasaran, dan regulasi sering tumpang tindih. Jadi, bedanya ada di pelaksanaan dan konsistensi. Negara lain fokus dan jalan terus, sementara Indonesia masih sibuk menyusun rencana tanpa memastikan pelaksanaannya kuat di lapangan.
3. Berdasarkan kondisi Indonesia sekarang, kebijakan industri yang baru sebaiknya lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya, jangan langsung menargetkan industri canggih seperti robotika, tapi mulai dulu dari sektor yang sudah ada dan potensial, misalnya industri makanan, otomotif, atau elektronik ringan. Pemerintah bisa fokus membangun kawasan industri yang benar-benar siap pakai, lengkap dengan infrastruktur, listrik, dan akses logistik yang lancar. Selain itu, perlu ada program pelatihan dan pendidikan vokasi yang melibatkan langsung perusahaan, supaya tenaga kerja kita benar-benar sesuai kebutuhan industri. Kebijakan insentif juga harus lebih tepat sasaran,

misalnya dengan memberi keringanan pajak bagi perusahaan yang melakukan riset, pelatihan, atau memakai produk lokal. Yang nggak kalah penting, harus ada lembaga khusus yang mengawasi jalannya program ini supaya nggak cuma jadi slogan. Jadi intinya, kebijakan baru ini harus lebih fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Kalau semua pihak bisa bekerja sama dan pemerintah serius membangun pondasi industrinya, Indonesia bisa keluar dari jebakan deindustrialisasi dini dan mulai bangkit sebagai negara industri yang lebih kuat.